



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 88 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEKERJAAN UMUM WILAYAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; pembentukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada setiap satuan kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEKERJAAN UMUM WILAYAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum Wilayah yang selanjutnya disingkat UPT Pekerjaan Umum Wilayah adalah Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
5. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPT Pekerjaan Umum Wilayah Ciawi, meliputi Kecamatan Ciawi, Kecamatan Kadipaten, Kecamatan Pagerageung, Kecamatan Sukaresik dan Kecamatan Jamanis;
 - b. UPT Pekerjaan Umum Wilayah Sukaratu, meliputi Kecamatan Sukaratu, Kecamatan Rajapolah, Kecamatan Padakembang, Kecamatan Cisayong dan Kecamatan Sukahening;
 - c. UPT Pekerjaan Umum Wilayah Manonjaya, meliputi Kecamatan Manonjaya, Kecamatan Gunungtanjung, Kecamatan Cineam dan Kecamatan Karangjaya;
 - d. UPT Pekerjaan Umum Wilayah Singaparna, meliputi Kecamatan Singaparna, Kecamatan Leuwisari, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Cigalontang, Kecamatan Mangunreja dan Kecamatan Sariwangi;
 - e. UPT Pekerjaan Umum Wilayah Taraju, meliputi Kecamatan Taraju, Kecamatan Bojonggambir, Kecamatan Sodonghilir, Kecamatan Puspahiang dan Kecamatan Salawu;

- f. UPT Pekerjaan Umum Wilayah Sukaraja, meliputi Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Tanjungjaya, Kecamatan Jatiwaras, Kecamatan Cibalong dan Kecamatan Parungponteng;
- g. UPT Pekerjaan Umum Wilayah Karangnunggal, meliputi Kecamatan Karangnunggal, Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Bantarkalong, Kecamatan Bojongasih dan Kecamatan Culamega;
- h. UPT Pekerjaan Umum Wilayah Cikatomas, meliputi Kecamatan Cikatomas, Kecamatan Salopa, Kecamatan Pancatengah dan Kecamatan Cikalong.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Pekerjaan Umum Wilayah adalah unsur pelaksana teknis sebagian tugas operasional Dinas dilapangan.
- (2) UPT Pekerjaan Umum Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Jalan dan Jembatan dan secara operasional berkoordinasi dengan semua unsur pemerintahan di wilayah kerjanya.

BAB IV TUGAS, FUNGSI, KEPEGAWAIAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

UPT Pekerjaan Umum Wilayah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas operasional Dinas dalam penyelenggaraan pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi kebinamargaan, pengairan, pertamanan dan permakaman diwilayah kerjanya.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pekerjaan Umum Wilayah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan kebinamargaan, pengairan, pertamanan dan permakaman di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan Dinas, lembaga teknis terkait dalam pengelolaan kebinamargaan, pengairan, pertamanan dan permakaman;
- c. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan perkembangan UPT Pekerjaan Umum Wilayah;
- d. pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Kepegawaian
Paragraf 1
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 6

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional di lingkungan UPT Pekerjaan Umum Wilayah diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Eselon

Pasal 7

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPT Pekerjaan Umum Wilayah, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pejabat Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pekerjaan Umum Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
RINCIAN TUGAS UNIT DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala UPT

Pasal 9

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPT Pekerjaan Umum Wilayah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi kegiatan pemantauan, dan pengawasan pemanfaatan dan prasarana jalan dan jembatan, pengairan, pertamanan dan pemakaman sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian dan pengawasan kegiatan UPT Pekerjaan Umum Wilayah;

- b. pelaksanaan tugas pembantuan dinas di bidang pembinaan dan bimbingan serta perencanaan maupun perumusan kebijakan teknis di bidang binamarga, pengairan, pertamanan dan pemakaman;
- c. penyusunan petunjuk teknis dan pedoman yang berkaitan dengan kegiatan binamarga, pengairan, pertamanan dan pemakaman;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kegiatan pengelolaan jalan dan jembatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kegiatan pengelolaan taman-taman kota sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan;
- f. pelaksanaan pemeliharaan taman-taman kota dan penggantian tanaman yang rusak dengan tanaman baru serta pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum;
- g. perencanaan dan pengkajian pembangunan taman- taman kota dan pembuatan Tempat Pemakamam Umum dan proses permohonan lokasi tempat pemakaman bukan umum;
- h. pengendalian, pemantauan pemasangan reklame dan rekomendasi pemberian izin pemasangan reklame sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan perlengkapan serta aset;
- j. penyusunan usulan rencana anggaran dan pendapatan UPTD Pekerjaan Umum Wilayah;
- k. penyusunan usulan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Pekerjaan Umum Wilayah;
- l. pelaksanaan kesekretariatan pada UPT Pekerjaan Umum Wilayah;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Desa yang berkaitan dengan kegiatan bidang pertanian;
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPT Pekerjaan Umum Wilayah;
- o. penyelenggaraan pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Pekerjaan Umum Wilayah;
- p. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait;
- q. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPT Pekerjaan Umum Wilayah;
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif, mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, penyusunan program dan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan di lingkungan UPT Pekerjaan Umum Wilayah.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. menyusun rencana kerja UPT Pekerjaan Umum Wilayah;

- b. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan UPT Pekerjaan Umum Wilayah;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPT Pekerjaan Umum Wilayah;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT Pekerjaan Umum Wilayah;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPT Pekerjaan Umum Wilayah;
- f. melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan UPT Pekerjaan Umum Wilayah;
- g. melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPT Pekerjaan Umum Wilayah;
- i. melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Pekerjaan Umum Wilayah;
- j. melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan UPT Pekerjaan Umum Wilayah;
- k. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPT Pekerjaan Umum Wilayah;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPT secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Jalan dan Jembatan.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan UPT Pekerjaan Umum Wilayah baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional harus menegakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (4) Kepala UPT harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan.
- (5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPT Pekerjaan Umum Wilayah harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPT, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menyampaikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Pengaturan mengenai jenis laporan dan penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Pada UPT Pekerjaan Umum Wilayah dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPT Pekerjaan Umum Wilayah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

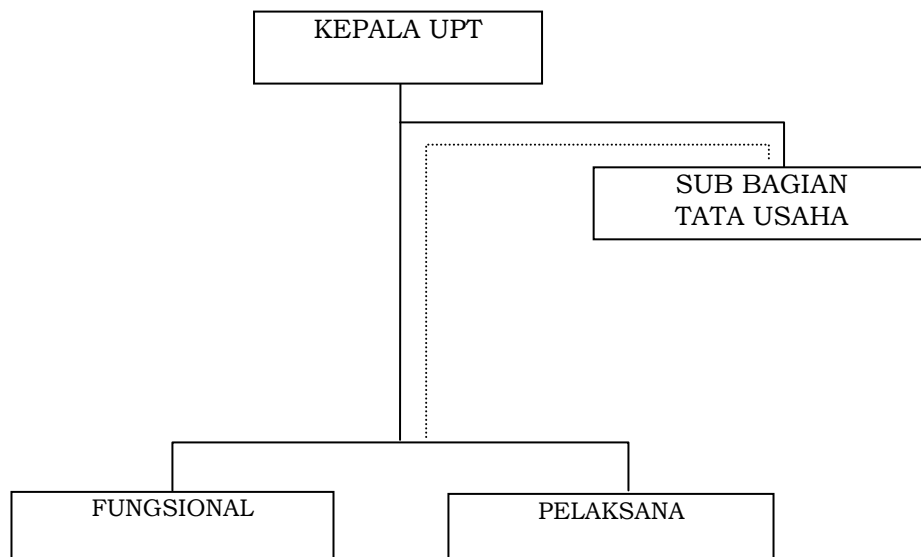
ttd

H. ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 88

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 88 TAHUN 2016
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEKERJAAN UMUM WILAYAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PEKERJAAN UMUM WILAYAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

UU RUZHANUL ULUM